



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Pemberitaan
Media terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat
pada Perang Vietnam**

Skripsi

Oleh

Asiila Kamilia

2014330191

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisis Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Pemberitaan
Media terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat
pada Perang Vietnam**

Skripsi

Oleh

Asiila Kamilia

2014330191

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita, M.A.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Asiila Kamilia
NPM : 2014330191
Judul : Analisis Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Pemberitaan Media terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Perang Vietnam

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 20 Desember 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Sekretaris
Adrianus Harsawaskita, MA

: 

Anggota
Giandi Kartasmita, MA

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Asiila Kamilia

NPM : 2014330191

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Analisis Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Pemberitaan Media terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Perang Vietnam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 13 Desember 2017



Asiila Kamilia

“The subject of foreign policy in the United States

is like the subject of snakes in Ireland.

There are no snakes in Ireland.”

- *Lord Bryce, UK Ambassador to the USA (1907-1913)*

“Television and the press in Vietnam?

Or, yes, I can hear you very well-

Just what was it you were saying?”

- *Living Room Wars, Michael J. Arlen*

“Frank,” said the early-morning wake-up call,

“are you trying to fuck me?”

“Who is this?” said the still sleepy Stanton.

“Frank, this is your President,

and yesterday your boys shat on the American flag.”

- *President Johnson to CBS Executive.*

“Now,” says Phuc, “that terrified little girl in the picture is not running anymore.

She's flying.”

- *Kim Phuc, The Girl in the Picture*

ABSTRAK

Nama : Asiila Kamilia
NPM : 2014330191
Judul : Analisis Kebijakan Luar Negeri: Pengaruh Pemberitaan Media terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat pada Perang Vietnam

Selama periode Perang Dunia I, II, hingga Perang Korea, perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat masih terpusat pada elit politik pemegang kekuasaan. Media pun tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan. Hal ini bertolak belakang dengan konsep negara demokrasi yang mengakui peran media sebagai *the Fourth Estate*. Namun ketika Perang Vietnam, media mulai ikut terlibat dan mempengaruhi elit politik dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang membahas bagaimana media dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional adalah perang. Kemudian teori yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah 5 (lima) kerangka berpikir dari Gadi Wolfsfeld, yaitu hubungan kedekatan antara media dengan pemerintah, pemberitaan media mengenai perdebatan antar aktor politik, unsur subjektivitas media, jenis cerita yang menarik, serta dampak pemberitaan media terhadap opini publik. Kelima kerangka tersebut akan mengungkapkan bagaimana keterkaitan antara pemberitaan media nasional dengan kebijakan luar negeri.

Sebagai *the first television war*, ternyata pemberitaan media yang menampilkan gambar eksplisit serta cerita yang dramatis selama keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam berkontribusi terhadap penurunan dukungan publik domestik terhadap kebijakan pemerintah. Melemahnya dukungan masyarakat sebagai dampak dari masifnya publikasi media mengenai perang pada akhirnya semakin mendesak aktor politik, sehingga pemerintah memutuskan untuk menghentikan perannya di Vietnam.

ABSTRACT

Name : Asila Kamilia
NPM : 2014330191
Title : *Foreign Policy Analysis: The Impact of Media Coverage on the American Foreign Policy in the course of Vietnam War*

During the period of World War I, II, up until the Korean War, the construction of American foreign policy was still centralized in the elites. The media did not have any chance nor opportunity to be involved in the formation of a country's foreign policy. This particular phenomenon contradicted to the very concept of a democratic state which acknowledged the role of media as the Fourth Estate. Yet on the Vietnam War, the media started to be taken into account and influence the elites in the making of foreign policy.

This thesis uses the study case method which explores how the media could influence foreign policy. One of the foreign policy instruments in which the government could use to achieve its national interest is by waging war. The theory that is used to analyze the case is the 5-framework from Gadi Wolfsfeld, which are the relation between media and government, the media coverage on the debates between political actors, media subjectivity, interesting story, and the impact of media coverage on the public opinion. Those five frameworks will examine the linkages between national media coverage with the state's foreign policy.

As the first television war, it turns out that the media coverage which shows an array of explicit footages alongside with the dramatic stories throughout America's involvement in the Vietnam War contributed to the decline of domestic public towards the government's policy. The deterioration of American support as the consequence of massive media publication on the war pressured the elites, and eventually pushing the government to end its role in Vietnam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh media terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama keterlibatannya dalam Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1964 hingga 1973. Penulis juga menganalisa bagaimana pola pemberitaan media dalam meliput meliput Perang Vietnam dapat mempengaruhi dinamika dukungan publik domestik Amerika terhadap kebijakan luar negeri pemerintahnya. Sehingga hal tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap keputusan para elit politik untuk menghentikan keterlibatannya dalam Perang Vietnam.

Walaupun penulis berupaya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin, namun penulis juga menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih membutuhkan perbaikan. Maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut untuk melengkapi dan menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab dengan baik oleh penulis. Dengan demikian, penulis terbuka atas segala kritik, saran, serta rekomendasi yang bersifat konstruktif dan membangun guna memperbaiki kekurangan dari penelitian ini.

Bandung, 6 Desember 2017

Penulis

Ucapan Terima Kasih

Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Alam Semesta,

Atas kemampuan untuk menyelesaikan, kesempatan untuk memperbaiki, kesulitan agar menguatkan, serta kemudahan agar meringankan.

Kepada Wakil Tuhan di Dunia,

Atas kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa, yang hanya memberi tak harap kembali, dan atas doa di setiap sujudnya.

Kepada Adrianus Harsawaskita, M.A.

Atas perannya yang sangat sentral, atas keseriusan dan kesabarannya dalam membimbing, dan atas semua kritik serta sarannya yang konstruktif.

Kepada Raisya Majory,

Atas perannya sebagai sahabat, *the sister I never really had*, walaupun tidak ada kontribusinya di skripsi ini, tapi eksistensinya akan selalu penting.

Kepada Mirza Narendra Ramadia,

Atas perannya sebagai sahabat terbaik, dan atas jasanya meminjamkan student ID RMIT biar bisa buka library-nya!

Kepada Bryan Nicholas Bonsaleng,

Atas hiburan di kala penat, canda ketika suntuk, lelap di tengah insomnia, yang mengganti air mata jadi tawa, atas dirinya sendiri yang datang sebagai obat penyembuh, dan atas kehadirannya yang sudah lebih dari cukup.

Kepada Grey Area,

Atas pertemanannya dan martabak tipker Asan jam 10 malam. ☺

Kepada Omar Abdul Majid,

Atas buku Henry Kissinger dan atas jawaban buat segala pertanyaan perskripsian.

Kepada Diandra Dewi, M.Sc.

Atas pelajarannya selama kuliah yang sedikit-banyak membentuk aku jadi lebih tahan banting dalam menuntut ilmu. *May you rest in peace*, Mbak.

Dan kepada Kota Bandung,

Atas rumah singgah yang lebih dari nyaman, atas udara yang sejuk, atas langit yang cerah untuk melihat bintang, dan untuk setiap kenangan di sudut kecil kota.

semoga yang patah tumbuh dan yang hilang berganti.

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Daftar Isi	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Singkatan	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang Masalah	1
1. 2. Identifikasi Masalah	5
1. 2. 1 Pembatasan Masalah	8
1. 2. 2 Perumusan Masalah	9
1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. 3. 1 Tujuan Penelitian	9
1. 3. 2 Kegunaan Penelitian	9
1. 4. Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran	10
1. 4. 1 Kajian Literatur	10
1. 4. 2 Kerangka Pemikiran	15
1. 5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	21
1. 5. 1 Metode Penelitian	21
1. 5. 2 Teknik Pengumpulan Data	21
1. 6. Sistematika Pembahasan	22
BAB II Kebijakan Global Amerika Dan Perang Vietnam	24
2. 1 Kebijakan Global Amerika Serikat saat Perang Dingin ..	24
2. 2 Anti-Komunisme dan Kebijakan Pembendungan	26
2. 3 Kajian Historis Perang Vietnam	30
BAB III Pengaruh Pemberitaan Media Terhadap Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pada Perang Vietnam	42
3. 1 Dinamika Media Amerika Serikat selama Perang Vietnam	43
3.1.1 Hubungan Kedekatan antara Pemerintah dengan Media	51
3.1.2 Pemberitaan Media mengenai Perdebatan dalam Pemerintah	58
3.1.3 Unsur Subjektivitas Media	62
3.1.4 Jenis Cerita yang Menarik	68
3.1.5 Dampak Pemberitaan Media terhadap Opini	

Publik	75
3.2 Kebijakan Amerika Serikat untuk Menghentikan Keterlibatan di Vietnam	81
BAB IV KESIMPULAN	90
Daftar Pustaka	95

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.3.1	Dukungan Publik terhadap Presiden Johnson	66
Grafik 3.2.1	Dukungan Publik terhadap Presiden Nixon	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pendapat Masyarakat AS terhadap Rusia	26
Gambar 2.3.1	Mobil Tank Pasukan Tentara AS di Saigon	34
Gambar 2.3.2	<i>The Fall of Saigon</i>	40
Gambar 3.1.1.1	Halaman Depan <i>Times</i> saat Peristiwa Teluk Tonkin	53
Gambar 3.1.1.1	<i>Front-page</i> Majalah TIME	54
Gambar 3.1.4.1	Foto Korban Pembantaian My Lai di Majalah LIFE	71
Gambar 3.1.4.2	Foto Korban Pembantaian My Lai di Majalah LIFE	72
Gambar 3.1.4.3	Foto Korban Pembantaian My Lai di Majalah LIFE	72
Gambar 3.1.4.4	<i>The Girl in the Picture</i>	74
Gambar 3.1.5.1	<i>Saigon Execution</i>	77

DAFTAR SINGKATAN

AP	Associated Press
AS	Amerika Serikat
Times	The New York Times
Post	The Washington Post
CBS	Columbia Broadcasting System News
NATO	The North Atlantic Treaty Organization
NVA	North Vietnamese Army
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Masalah

Selama masa-masa perang, baik dalam proses perumusan atau dalam implementasi suatu kebijakan luar negeri, pemerintah tidak banyak memberikan kesempatan bagi dunia jurnalistik untuk terlibat karena pemerintah memegang kendali yang cukup signifikan dan dominan terkait pergerakan pers. Akibatnya, media tidak bisa memberikan pengaruh yang cukup berarti mengenai keputusan kenegaraan mengingat tidak tersedianya kebebasan dan akses yang layak terhadap sumber informasi. Hal ini pun kemudian menjadi karakteristik umum dari relasi antara pemerintah dengan media selama perang berlangsung.¹

Dalam keadaan perang, banyak informasi dan fakta yang berusaha dirahasiakan pemerintah dari media dan masyarakat, sehingga media tidak memiliki kebebasan untuk memberitakan artikel-artikel yang ditulis oleh jurnalisnya. Pemerintah mempunyai batasan-batasan tertentu mengenai bahan materi apa saja yang dapat dipublikasikan media dan apa yang harus dijadikan rahasia negara. Suatu berita dilarang beredar jika mengandung unsur materi yang sensitif, seperti rahasia intelijen, peristiwa kejahatan perang yang dilakukan negara, dan segala sesuatu yang pada dasarnya dapat membahayakan agenda

¹ Filiz Coban, *The Role of the Media in International Relations: From the CNN Effect to the Al – Jazeera Effect*, Journal of International Relations and Foreign Policy Vol. 4, No. 2, (American Research Institute for Policy Development, 2016), hal. 47

pemerintah. Jenis berita yang dianggap dapat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat juga akan diamankan agar tidak terjadi kerusuhan publik, karena dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya kepentingan dan kebijakan negara. Akibatnya, segala bentuk arus informasi dan data yang dapat diakses oleh media terkait perang berada dalam kendali pemerintah dan sebelum liputan-liputan tersebut dipublikasikan, pemerintah akan memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap artikel yang akan terbit.²

Sebelum menjadi sektor yang lebih independen seperti masa modern sekarang, pemerintah sempat menggunakan media sebagai juru bicara negara. Salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan media adalah dengan mengatur proses penyiaran berita yang lebih sering dinaskahi. Hal tersebut dilakukan pemerintah agar informasi yang tersebar luas ke masyarakat sesuai dengan apa yang mereka inginkan demi menciptakan sebuah ilustrasi tertentu sekaligus memperoleh dukungan dari rakyat. Dalam hal ini, pemerintah paham bahwa mereka memiliki keterbatasan untuk mengendalikan opini publik secara massal, oleh karena itu peran media cukup esensial dalam membantu pemerintah membentuk opini publik yang mendukung kebijakan negara.³

Semakin berjalannya periode Perang Dingin, pemerintah sadar bahwa media memiliki kesempatan yang lebih besar dalam membentuk opini publik. Dalam hal ini, media berperan penting dalam membantu pemerintah untuk

² Michael S. Sweeney, *Secrets of Victory: The Office of Censorship and the American Press and Radio in World War II*, (Chapel Hill, North Carolina: The University of North Carolina Press, 2001), hal. 2-3

³ Susan L. Carruthers, *The Media at War*, (Houndmills, 2011: Palgrave Macmillan)

kembali meyakinkan dan menegaskan rakyat agar tetap setia kepada kebijakan politik negaranya. Media pun sempat berhasil membentuk opini publik yang mendukung kebijakan pemerintah untuk melawan musuh, terutama pada saat terjadi konflik dan perang. Sehingga tanpa bantuan dari media, besar kemungkinannya bahwa pemerintah akan kesulitan memperoleh dukungan yang kuat dan konstan dari rakyatnya.⁴

Cara lain yang dilakukan pemerintah dalam usaha untuk menarik dukungan masyarakat adalah penyebaran berbagai macam bentuk propaganda yang dipolitisasi oleh aktor-aktor politik. Peran propaganda ini sangat penting di masa-masa perang karena berguna untuk menarik simpati dan dukungan dari dalam negeri. Suatu propaganda dibentuk dan didesain sebaik mungkin untuk mengirimkan pesan tersirat kepada rakyat domestik agar mempertahankan pandangan antagonis mereka terhadap kebijakan politik dan ekonomi musuh. Propaganda ini dipublikasikan di hampir seluruh aspek kehidupan rakyat melalui berbagai macam media; mulai dari televisi, radio, media cetak, hingga ke sekolah-sekolah. Hal ini diperlukan agar ide dan gagasan utama dari propaganda tersebut dapat terserap dengan baik dan menyatu ke dalam pikiran masyarakat, sehingga membentuk sebuah opini publik yang dengan tegas mendukung kebijakan pemerintah.⁵

⁴ Vladimir Bratic, *Examining Peace-Oriented Media in Areas of Violent Conflict*, (Roanoke, Virginia: Hollins University, 2008), hal. 4

⁵ Thomas Doherty, *Cold War, Cool Medium: Television, McCarthyism, and American Culture*, (New York, 2003: Columbia University Press)

Absennya keterlibatan militer secara langsung selama Perang Dingin juga membuat pemerintah AS memaksimalkan peran media untuk mendapatkan dukungan domestik sebanyak-banyaknya. Demi memenangkan perang, pemerintah juga menggunakan media untuk menggoyahkan mental musuh atau dalam kata lain menyerang secara psikologis.⁶ Selain digunakan sebagai senjata psikologis, media juga dimanfaatkan oleh pejabat resmi AS sebagai instrumen untuk memberi gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat Amerika mengenai perbedaan ideologi yang dianut oleh Blok Barat dan Blok Timur sebagai upaya untuk membendung pengaruh komunisme.⁷

Contoh-contoh peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana fenomena minimnya peran media ini bertolak belakang dengan konsep dasar negara demokrasi, terutama bagi Amerika Serikat sebagai salah satu negara besar yang menganut sistem demokrasi. Semenjak abad ke-17, peran media telah diakui oleh pemerintah sebagai aktor yang menawarkan wadah atau forum untuk melangsungkan perdebatan atau kajian politik, menyelenggarakan diskusi, serta memberikan informasi kepada masyarakat luas. Dengan peran seperti itu, diharapkan media dapat membantu pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat merepresentasikan aspirasi publik. Konsep ini secara umum disebut *the Fourth Estate* yang artinya dalam negara demokrasi, media memiliki tempat tersendiri yang bersebelahan dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisi ini memberikan fungsi *check and balance* bagi pers untuk melakukan

⁶ James C. Foust, *U.S. Television News and Cold War Propaganda, 1947-1960*, dalam *American Journalism*, Vol. 18, No. 2, (2001, Routledge), hlm. 107

⁷ Filiz Coban, *Op.Cit.*, hal. 51

evaluasi terhadap kinerja badan pemerintah yang lain. Dalam negara demokrasi, penting bagi suatu pemerintahan agar dilengkapi dengan *Fourth Estate* yang kritis serta memiliki keberanian untuk memberikan penilaian, bahkan menegur pemerintah jika memang diperlukan.⁸

Ketika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh elit politik atau terbentuknya suatu kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, salah satu cara yang dapat dilakukan media adalah dengan mempublikasikannya kepada masyarakat luas, sehingga secara tidak langsung dapat sekaligus memobilisasi rakyat untuk menentang pemerintah. Peran tersebut bersifat esensial bagi negara demokrasi untuk menjamin berjalannya sistem pemerintahan yang efektif dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sehingga media menjadi perantara dan jembatan penghubung untuk menyalurkan opini publik dan meneruskannya ke pemerintah.⁹

1. 2 Identifikasi Masalah

Peristiwa Perang Vietnam menjadi suatu momentum penting yang menjadi titik balik masuknya pengaruh dari aktor selain elit politik dalam perumusan kebijakan luar negeri. Aktor spesifik yang secara signifikan mengubah proses konstruksi kebijakan ini adalah media. Sebelum hal ini terjadi, baik itu dari elit politik maupun kalangan akademisi beranggapan bahwa media tidak memiliki andil yang

⁸ Sheila S. Coronel, *The Role of the Media in Deepening Democracy*, (United Nations Online Network in Public Administration and Finance, 2003), <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010194.pdf>, hal. 4-5, diakses pada 25 November 2017

⁹ Sonia Livingstone, *Talk on Television: Audience Participation and Public Debate*, (London: Routledge, 1993), hal. 11

signifikan dalam perumusan kebijakan negara. Perspektif tersebut kemudian mulai berubah semenjak Amerika Serikat terlibat langsung dalam Perang Vietnam.¹⁰

Di awal terjadinya Perang Vietnam, pemerintah AS memastikan bahwa keberpihakan media kepada negara terlihat dari pola penayangan berita yang mempublikasikan liputan sesuai dengan agenda pemerintah. Hal ini dengan sengaja dilakukan agar pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat Amerika terhadap kebijakan AS untuk terlibat dalam perang dan membantu Saigon. Pemerintah pun mengontrol setiap arus informasi yang berkaitan dengan peristiwa dan insiden apapun mengenai perang serta menutup rapat-rapat perdebatan politik yang sebenarnya terjadi di dalam administrasi. Hal ini dilakukan supaya isu Perang Vietnam tidak menjadi bahan berita yang kontroversial dan menimbulkan pertanyaan dari publik.¹¹

Namun kebijakan luar negeri AS mulai dipengaruhi dunia jurnalistik semenjak media secara tidak langsung terlibat dalam Perang Vietnam. Keterlibatan media dalam memberitakan situasi perang perlahan tidak lagi didominasi oleh perintah dari *White House* karena reporter mulai berperan aktif dalam meliput berita-berita di luar lingkungan pemerintahan. Seperti pada tahun 1965 ketika wartawan nasional mulai meliput aksi demo publik AS yang tidak menyetujui keterlibatan pemerintahnya di Perang Vietnam. Demo yang dilakukan

¹⁰ Laura King, *The Media and The Military in Vietnam and Afghanistan*, (Oxford: University of Oxford, 2012), hal. 4

¹¹ Hana Cihankova, *Influence of Media on Vietnam War*, (Olomouc: Palacký University, 2014), hal. 7

masyarakat Amerika dipicu oleh aksi pengeboman yang dilakukan oleh Presiden Johnson sebagai serangan balik atas peristiwa di Teluk Tonkin. Terdapat gerakan anti-perang di Washington yang diikuti oleh sekitar 15.000 hingga 25.000 orang, terdiri dari rakyat AS dari berbagai macam kalangan, seperti penduduk kelas menengah dan para serikat pekerja, tetapi didominasi oleh mahasiswa.¹²

Peran media semakin aktif dalam meliput Perang Vietnam ketika terjadi peristiwa *Tet Offensive*. Setelah sebelumnya media nasional ramai membahas protes masyarakat Amerika, insiden Serangan Tet ini dapat dikatakan sebagai *turning point* yang menandakan drastisnya perubahan pola pemberitaan media dan melemahnya dukungan publik terhadap pemerintah AS. Semenjak Serangan Tet terjadi, Perang Vietnam sangat didominasi oleh liputan dan publikasi dari media nasional Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan penduduk AS dengan mudahnya mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan detail tentang apa yang dilakukan oleh Washington di tanah Vietnam. Secara konstan dan reguler, media menyiarkan berita dan menayangkan gambaran eksplisit mengenai situasi di Vietnam tanpa menyeimbangkannya dengan informasi mengenai kebijakan politik AS terlibat dalam perang tersebut. Cara media membingkai Serangan Tet adalah dengan menampilkan rekaman tanpa edit (*raw footage*) beserta gambar-gambar korban tanpa sensor yang menunjukkan penderitaan manusia akibat perang, ditambah dengan ketidakjelasan mengenai tujuan apa yang sebenarnya ingin

¹² Mark Barringer, *The Anti-War Movement in the United States*, diambil dari *Encyclopedia of the Vietnam War: A Political, Social, and Military History* oleh Spencer C. Tucker, (Oxford: Oxford University Press, 1998)

dicapai oleh pemerintah, maka tidak heran jika masyarakat Amerika Serikat semakin menolak keterlibatan pemerintah.¹³

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa peran media yang mulai terlibat aktif dalam mempublikasikan perkembangan perang serta melaporkan situasi langsung di Vietnam membuka jalan terhadap lahirnya opini publik masyarakat AS yang menolak tindakan pemerintahnya sendiri. Media pun menjadi aktor yang cenderung lebih independen dan tidak lagi disetir oleh kepentingan politik semata. Adanya peristiwa *Tet Offensive* juga menjadi titik perubahan terkait pola pemberitaan media mengenai Perang Vietnam.

1. 2. 1 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian mengenai studi kebijakan luar negeri yang mendapatkan pengaruh dari media. Secara khusus, penulis membahas mengenai pengaruh yang diberikan oleh media terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama keterlibatannya dalam Perang Vietnam. Periode yang dipilih penulis yaitu setelah Perang Indochina selesai karena pada masa ini Amerika mulai terlibat untuk menggantikan Perancis. Rentang waktu yang dipilih penulis paling awal dimulai dari tahun 1961 hingga penarikan pasukan tentara AS dari Vietnam tahun 1973 dan ditanda tangannya perjanjian Paris (*Paris Peace Accords*).

¹³ Kyle Hadyniak, *How Journalism Influenced American Public Opinion During the Vietnam War: A Case Study of the Battle of Ap Bac, The Gulf of Tonkin Incident, The Tet Offensive, and the My Lai Massacre*, (Honors College, 2015), hal. 41-42

1. 2. 2 Perumusan Masalah

Sebagai acuan dari penelitian ini, maka rumusan masalah dituangkan oleh penulis dalam bentuk sebuah pertanyaan sebagai berikut: “*Bagaimana media mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah Amerika Serikat di Perang Vietnam?*”

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. 3. 1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditulis untuk memberikan penjelasan mengenai pengaruh media nasional Amerika Serikat terhadap pertimbangan pemerintah AS dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri di Perang Vietnam.

1. 3. 2 Kegunaan Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai keterlibatan media selama masa keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai informasi, data, serta pengetahuan tambahan terkait media dan Perang Vietnam itu sendiri, juga mengenai kebijakan luar negeri Amerika bagi peneliti lain yang juga mengkaji hal serupa. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi gerbang pembuka untuk lebih mempopulerkan kajian mengenai media terhadap kebijakan luar negeri di kalangan mahasiswa UNPAR.

1. 4 Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

1. 4. 1 Kajian Literatur

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai relasi antara media dan kebijakan luar negeri. Piers Robinson dengan tulisannya yang berjudul *The Role of Media and Public Opinion* dalam buku *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases* tahun 2008 memaparkan bahwa aktor media dan opini publik memiliki pengaruhnya tersendiri bagi konstruksi kebijakan luar negeri suatu negara.¹⁴ Robinson mengkaji keterkaitan antara media dan opini publik terhadap kebijakan luar negeri secara umum, dengan mengulas bagaimana pemerintah juga dapat mempengaruhi media dan opini publik, serta bagaimana pengaruh media dan opini publik tersebut jika dilihat dari sudut pandang beberapa teori-teori besar dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional seperti realisme, liberalisme, dan *critical theory*.

Menurut Robinson, bagi negara yang menganut sistem demokrasi, media dan opini publik memiliki pengaruh dan dapat terlibat dalam kebijakan luar negeri yang dibuat pemerintah. Masyarakat yang tinggal di negara demokrasi memiliki hak untuk melihat opininya tercermin dalam kebijakan yang dibuat pemerintah, tidak terkecuali kebijakan luar negeri. Pemerintah pun mempunyai tanggung jawab untuk bersifat *responsive* atau tanggap terhadap aspirasi rakyatnya. Di sisi lain, media seperti berita elektronik di televisi atau konvensional di surat kabar, juga memiliki fungsi sebagai wadah yang memberikan fasilitas bagi masyarakat

¹⁴ Piers Robinson, *The Role of Media and Public Opinion*, dalam *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*, (Oxford: Oxford University Press, 2008), hal. 138-150

luas untuk menggelar debat terbuka mengenai isu-isu penting negara. Dari pemberitaan tersebut, masyarakat dapat mencapai suatu konsensus tentang isu tertentu dan akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, media diharapkan dapat berperan sebagai *watchdog* atau penjaga pemerintah yang bersifat objektif.

Namun konsep mengenai peran yang dimiliki oleh media dan opini publik terhadap kebijakan luar negeri tidak mempunyai aturan yang ajek karena pandangan tersebut akan berbeda bagi setiap teori dalam ilmu Hubungan Internasional. Seperti dalam teori realisme, media dan opini publik merupakan aktor yang tidak relevan apabila digunakan untuk menganalisis peristiwa internasional. Sedangkan teori liberalisme justru lebih mengakui bahwa opini publik dapat menjadi hambatan tersendiri bagi kebijakan luar negeri dan media harus bersifat independen dari pemerintah ketika meliput fenomena internasional. Bagi *critical theory*, negara tetap menjadi aktor utama dan media dapat didominasi oleh negara serta opini rakyat yang dibentuk oleh elit-elit politik.

Kemudian penulis akan membahas mengenai studi kebijakan luar negeri dengan media dari buku *American Foreign Policy: Pattern and Process* dari Eugene R. Wittkopf, Christopher M. Jones, dan Charles W. Kegley, Jr.¹⁵ Salah satu sub-bagian dalam buku tersebut menjelaskan bagaimana peran media terhadap opini publik dan kebijakan luar negeri. Dikatakan bahwa terdapat 2 (dua) peran penting yang dimiliki oleh industri komunikasi (media) terhadap dunia

¹⁵ Eugene R. Wittkopf, Christopher M. Jones, dan Charles W. Kegley, Jr., *American Foreign Policy: Pattern and Process*, (Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning, 2008), hal. 305-317

politik. Pertama, sikap dan opini publik dapat dipengaruhi atau bahkan dibentuk oleh informasi yang dipublikasikan media. Kedua, tindak-tanduk atau perilaku dari para pembuat keputusan itu sendiri juga dapat dipengaruhi oleh berita yang disebarluaskan media. Dari kedua peran tersebut, dapat dikatakan bahwa media merupakan jembatan yang menghubungkan nilai, kepercayaan, dan preferensi masyarakat Amerika terhadap kebijakan luar negeri. Terlepas dari adanya eksistensi masyarakat yang tidak menaruh perhatian besar terhadap politik dan kebijakan luar negeri, media tetap memiliki kapabilitas untuk memberikan beberapa jenis informasi kepada publik domestik. Beberapa jenis media, seperti *The New York Times*, dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi sebagian besar masyarakat, termasuk para elit politik yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri.

Melihat kapabilitas dan peran yang dimiliki media, maka banyak yang menganggap bahwa media adalah cabang ke-4 (selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dari pemerintahan atau disebut sebagai *the fourth estate*. Bahkan media juga dianggap sebagai sebuah institusi yang kuat karena dapat mempengaruhi banyak aspek dalam dinamika politik luar negeri Amerika. Wittkopf menyimpulkan, walaupun media bukan pendorong atau penyebab utama atas terjadinya perubahan pendirian pada masyarakat luas, namun media tetap berperan sebagai sarana penting terkait penyebaran informasi dan pendapat dalam dunia politik.

Kajian literatur selanjutnya membahas mengenai hubungan antara media dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat Perang Vietnam yang diambil dari

buku *The Uncensored War* karangan Daniel C. Hallin tahun 1986.¹⁶ Dalam bukunya, Hallin menjelaskan bahwa sebenarnya pemerintah dapat mengendalikan media dengan mudah dan sebaliknya media pun cenderung mengikuti aturan main negara. Hal ini terjadi di masa pemerintahan Administrasi Kennedy dan awal pemerintahan Presiden Johnson yang masih mendominasi pemberitaan media. Namun pola hubungan tersebut berubah ketika pemerintah mulai bersikap tidak tegas terhadap isu tertentu dan diketahui oleh pihak media. Di saat pemerintah mulai terlihat ragu, disini lah media mulai mempertanyakan kebijakan yang diambil pemerintah. Jika kasus perdebatan antar aktor politik ini diketahui oleh jurnalis, maka media akan mempublikasikannya kepada masyarakat luas. Menurut Hallin, pola pemberitaan media selama Perang Vietnam yang bersifat semakin kritis merupakan hasil dari debat yang terjadi di kalangan elit politik. Liputan dari media tersebut mencerminkan adanya ketidaksepakatan mengenai kebijakan pemerintah terhadap perang. Hallin mengemukakan bahwa dalam Perang Vietnam, penurunan dukungan publik terhadap pemerintah tidak disebabkan oleh pola pemberitaan yang bias, melainkan karena refleksi media terhadap disensus yang terjadi di dalam pemerintahan itu sendiri.

Kajian mengenai media dan pemerintah dalam situasi perang juga dibahas oleh Graham Spencer dalam bukunya yang berjudul *The Media and Peace: From Vietnam to the War on Terror* tahun 2005.¹⁷ Pandangan yang cukup berbeda diutarakan Spencer dalam salah satu bab di bukunya yang khusus membahas

¹⁶ Daniel C. Hallin, *The Uncensored War: The Media and Vietnam*, (New York: Oxford University Press, 1986)

¹⁷ Graham Spencer, *The Media and Peace: From Vietnam to the War on Terror*, (Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2005), hal. 68-70

Perang Vietnam. Menurut Spencer, ketika media mulai mengalami perubahan dalam memberitakan perkembangan perang terutama setelah peristiwa Serangan Tet, jurnalis tidak menentang atau mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam perang karena mereka juga ingin melihat AS memenangkan perang. Tetapi reporter-reporter tersebut mempertanyakan keefektifan dari taktik-taktik yang diterapkan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya, bukan kebijakan itu semata.

Media juga tidak secara sengaja ikut campur dan mempengaruhi keterlibatan militer AS di Vietnam karena mereka hanya berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih efisien dibandingkan sebelumnya, walaupun akibat dari pemberitaan tersebut menurunkan dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, Spencer berpendapat bahwa pemberitaan media tidak mendesak pemerintah untuk menghentikan keterlibatannya dari Vietnam, tetapi menekan pemerintah agar menangani perang dengan strategi dan taktik yang lebih efektif.

Penulis sependapat dengan argumen Robinson dan Wittkopf yang menjelaskan bahwa media memiliki pengaruh dan keterlibatannya sendiri terhadap kebijakan luar negeri, terutama bagi Amerika Serikat yang menganut sistem demokrasi. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih jauh mengenai relasi antara pemerintah dengan media, dengan melihat perubahan pola pemberitaan media yang awalnya dikendalikan oleh pemerintah hingga menjadi lebih independen dan lepas dari kendali pemerintah, serta dampak yang dihasilkan

terhadap dukungan publik dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam Perang Vietnam.

1. 4. 2 Kerangka Pemikiran

Pemerintah memiliki berbagai macam cara yang dapat mereka implementasikan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, mulai dari yang bersifat *soft-power* seperti bantuan ekonomi hingga *hard-power* atau tindakan militer. Salah satu sarana yang dapat digunakan yaitu melalui perang. Secara klasik, perang telah diasosiasikan sebagai salah satu alat utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai kepentingan nasional negara. Perang ini sendiri juga dianggap sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang paling kuat.¹⁸ Terlepas dari adanya eksistensi instrumen lain selain perang, Baldwin beranggapan bahwa aspek militer ini tetap menjadi instrumen yang penting terkait upaya negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Bahkan instrumen militer dilihat sebagai cara yang paling efektif untuk mencapai kebijakan luar negeri yang bersifat ambisius atau sangat ingin dicapai oleh negara.¹⁹

Dalam studi kebijakan luar negeri, kita dapat menganalisis preferensi atau latar belakang sosial di balik terbentuknya suatu kebijakan. Salah satu *societal preferences* tersebut adalah media yang berperan sebagai jembatan penghubung antara publik dengan para pembuat kebijakan. Media menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat untuk melihat dinamika yang sedang terjadi di

¹⁸ R. T. Jangam, *An Outline of International Politics*, (New Delhi: Allied Publishers, 1981), hal. 109

¹⁹ David A. Baldwin, *Success and Failure in Foreign Policy*, dalam *Annual Review of Political Science*, Vol. 3, (California: Annual Review, 2000), hal.169-178

pemerintahan, sedangkan pembuat kebijakan mengikuti perkembangan media untuk mengetahui perkembangan pendapat rakyat. Melihat peran dan fungsi media bagi pemerintahan, maka terdapat studi yang mengkaji tentang relasi antara media dengan kebijakan luar negeri (*media and foreign policy*).²⁰

Sebagai negara demokrasi, kebijakan luar negeri tidak terlepas dari pengaruh aktor-aktor lain selain pemerintah dan elit politik. Untuk memahami keterlibatan berbagai macam aktor tersebut, terdapat 2 (dua) model yang dapat digunakan yaitu model pluralis dan elit, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan model pluralis. Model pluralis ini mempunyai asumsi bahwa kekuatan (*power*) yang dimiliki oleh suatu negara tidak terpusat pada pemerintah saja, melainkan tersebar di berbagai aktor lain, seperti media dan masyarakat umum. Berbeda dengan model elit, dalam pluralis tidak ada satu grup atau kepentingan tertentu yang terlalu mendominasi pihak lain. Gambaran mengenai penerapan model pluralis ini lebih jelas jika diimplementasikan di negara demokrasi karena sistem pemerintahan tersebut memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan tanggap terhadap apa yang dikatakan oleh rakyatnya. Model ini juga mengatakan bahwa kehendak dan pendapat masyarakat yang tinggal di negara demokrasi diharapkan dapat terlihat pada kebijakan apa yang diambil oleh pemerintahnya.²¹

²⁰ Stuart N. Soroka, *Media, Public Opinion, and Foreign Policy*, dalam *Harvard International Journal of Press/Politics* Vol. 8, No. 1 (2003), hal. 28

²¹ Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Timothy Dunne, *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*, (New York: Oxford University Press, 2008), hal. 138-139

Terkait teori kebijakan luar negeri, terdapat satu model pendekatan bernama *foreign policy system* yang digagas oleh Michael Breacher, Blema Steinberg, dan Janice Stein. Pendekatan tersebut mengkategorikan faktor-faktor penting dalam proses pembuatan suatu kebijakan luar negeri ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu *input-process-output*. Bagian yang sesuai dengan penelitian ini adalah kategori *input*, yaitu meliputi faktor eksternal seperti sistem global atau bilateral, faktor internal seperti kemampuan ekonomi, struktur politik, dan kelompok kepentingan, faktor komunikasi atau yang berarti media, hingga lingkungan psikologis (ideologi, kepribadian, dan tekanan dari sesama elit politik).²²

Untuk menjelaskan penelitian ini, penulis juga menggunakan teori dari James N. Rosenau, yaitu *pre-theory of foreign policy analysis*. Teori ini mengakui adanya sumber-sumber yang berkontribusi terhadap pembentukan kebijakan luar negeri. Sumber tersebut dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu individual, peran (*role*), pemerintah (*governmental*), aspek sosial (*societal*), dan yang terakhir adalah variabel sistemik (*systemic variables*). Kategori yang dapat menjelaskan peran media sebagai salah satu sumber kebijakan luar negeri adalah aspek sosial, yaitu segala sumber KLN yang tidak berasal dari sisi pemerintah.²³

Kemudian untuk menganalisis studi kasus, terutama menjawab perumusan masalah dari penelitian ini, penulis mengambil sebuah kerangka pemikiran dari

²² Paul G. Harris, *Environmental Change and Foreign Policy: Theory and Practice*, (New York: Routledge, 2009), hal. 4

²³ Emmanuel N. Amadife, *Pre-theories and Theories of Foreign Policy-making*, (Maryland: University Press of America, 1999), hal. 172

Gadi Wolfsfeld. *Making Sense of Media and Politics* yang baru diterbitkan tahun 2011 lalu menaruh perhatian pada bagaimana dunia politik, media serta masyarakat sipil saling mempengaruhi dengan berbagai macam cara. Dengan menaruh fokus di negara-negara demokrasi, Wolfsfeld mengungkapkan lima (5) buah kerangka utama yang menggambarkan hubungan antara dunia politik dan media beserta aktor-aktor di dalamnya hingga bagaimana dampak yang ditimbulkan antara kedua aspek tersebut terhadap masyarakat sipil.²⁴

Kerangka pertama, *'political power can usually be translated into power over the news media,'* menjelaskan tentang semakin tinggi kekuasaan atau jabatan yang dimiliki oleh seorang aktor politik maka semakin besar juga kekuasaan yang ia miliki terhadap media, seperti memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan liputan dari media dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuasaan atau jabatan lebih rendah. Aktor dengan kekuasaan lebih rendah tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan *media coverage*, tetapi jika mereka memiliki cerita yang menarik bagi media tertentu, sedangkan aktor politik lain yang lebih tinggi seperti presiden bisa dengan mudah bekerja sama dengan media.

Kemudian kerangka kedua, *'when the authorities lose control over the political environment they also lose control over the news'*, menjelaskan bahwa kontrol yang dimiliki oleh pemerintah terhadap media tidak bersifat konstan atau tetap. Kendali pemerintah atas media dan berita yang dipublikasikan dapat berkurang atau bahkan hilang ketika terdapat perdebatan di ranah politik dan

²⁴ Gadi Wolfsfeld, *Making Sense of Media and Politics: Five Principles in Political Communication*, (New York: Routledge, 2011)

pejabat pemerintah melakukan kesalahan dalam menangani suatu isu, sehingga kesalahan tersebut tercermin dalam liputan-liputan media. Wolfsfeld mengungkapkan bahwa kerangka ini juga dapat digunakan untuk menganalisis berbagai macam peran yang media miliki ketika negara sedang berperang atau bernegosiasi untuk berdamai. Hal tersebut dikarenakan pemerintah sedang berada di masa-masa yang lebih genting dari biasanya, sehingga media pun bersikap lebih peka dan sensitif terhadap setiap tindakan yang diambil pemerintah. Salah satu contohnya adalah ketika dalam perang terjadi kesalahan-kesalahan militer seperti kecelakaan *friendly-fire* membuat pemerintah kesulitan untuk menggambarkan bahwa perang tersebut berhasil atau sukses.

Kerangka ketiga, *'there is no such thing as objective journalism,'* mengungkapkan bahwa dalam dunia jurnalistik dan media, mereka tidak pernah benar-benar bersifat objektif terhadap suatu berita, dalam kata lain pasti ada unsur bias yang terkandung di dalamnya. Menurut Wolfsfeld, *true objectivity is totally impossible* karena setiap media pasti memiliki pertimbangannya sendiri dalam menyeleksi kasus apa yang akan mereka publikasikan.

Kerangka keempat, *'the media are dedicated more than anything else to telling a good story and this can often have a major impact on the political process,'* menjelaskan tentang kecenderungan media untuk mempublikasikan berita yang menarik perhatian pendengar daripada memberitakan *intelligent coverage* atau liputan yang bersifat cerdas dalam arti mendidik dan informatif. Wolfsfeld berpendapat bahwa media lebih suka menekankan unsur drama pada beritanya, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak tersendiri terhadap

bagaimana aktor politik bertindak dan bagaimana masyarakat luas melihatnya. Dalam kerangka ini, obsesi media terhadap drama menjadi lebih tinggi terkait perang dan kasus terorisme, oleh karena itu cara media meliput peristiwa-peristiwa yang terjadi saat situasi konflik memiliki pengaruh dan dampak yang lebih besar bagi publik.

Kerangka yang kelima dan terakhir, *'the most important effects of the news media on citizens tend to be unintentional and unnoticed'*, menjelaskan bahwa sebenarnya pengaruh yang dihasilkan oleh media terhadap publik bersifat tidak disengaja, dalam arti sebagian besar jurnalis dan orang-orang di balik layar media tidak secara sengaja berusaha untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik untuk mempercayai suatu pandangan politik tertentu. Mereka mengutamakan liputan peristiwa yang menarik dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Apapun dampak yang dihasilkan dari berita-berita tersebut akan dianggap sebagai *unintentional byproducts* atau produk akhir yang tidak sengaja dihasilkan. Dari sisi masyarakat sendiri juga mereka cenderung tidak sadar akan pengaruh tersirat yang disebabkan oleh publikasi media.

1. 5 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. 5. 1 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses dan teknik atau cara pengumpulan serta analisis data yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana selama proses penelitian berlangsung, penulis mengumpulkan data-data tertulis kemudian mengolah dan menganalisisnya hingga menghasilkan data akhir yang bersifat deskriptif. Jenis data yang dikumpulkan berupa tulisan akademik atau informasi resmi dan perilaku dari aktor yang tindakannya dapat diamati. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan, menyajikan, dan menghasilkan data yang menggambarkan tentang isu atau objek yang sedang diteliti.²⁵

1. 5. 2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode kualitatif ini, penulis menerapkan teknik studi literatur yang menggunakan dokumen-dokumen tertulis sebagai sumber informasi dan data karena sifatnya yang stabil dan dapat diakses berulang kali. Penulis juga mengedepankan sumber data yang mengandung unsur nama aktor dan institusi yang terkait dengan studi kasus, serta penjelasan mengenai peristiwa secara lengkap dan detail. Adapun dokumen yang penulis gunakan yaitu berbentuk buku,

²⁵ C. R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, (New Age International (P) Limited, New Delhi: 2004)

jurnal akademik, dokumen dan laporan resmi suatu negara atau institusi, serta artikel dan berita resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁶

1. 6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan pembagian BAB yang ada dalam penelitian. Susunan dari penelitian ini dibagi ke dalam 4 (empat) buah BAB, yaitu BAB I, II, III, dan IV.

- **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian awal ini, penulis mendeskripsikan latar belakang masalah yang di dalamnya juga termasuk identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari ditulisnya penelitian ini. Setelah itu penulis membahas kajian literatur serta kerangka pemikiran yang digunakan sebagai acuan dasar untuk menganalisis studi kasus. Lalu ditutup dengan rumusan mengenai metode dan teknik pengumpulan data serta penjelasan terkait urutan atau struktur pembahasan dari penelitian ini.

- **BAB II**

Penjelasan mengenai kebijakan global Amerika Serikat dan kajian historis Perang Vietnam yang sesuai dengan pembatasan masalah pada BAB I dibahas secara lebih detail dan lengkap pada bagian ini.

- **BAB III**

²⁶ Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, (California: Sage Publication, 2009), hal. 102

Pembahasan mengenai dinamika media Amerika selama terjadi perang dan analisis utama mengenai pengaruh media nasional terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa Perang Vietnam ditulis pada bagian ini

- **BAB IV Penutup**

BAB ini merupakan bagian penutup dari penelitian, yaitu berisi kesimpulan dari analisis yang sudah dilakukan dari BAB I hingga BAB III.